

September 2005

Kegagalan Referendum Konstitusi Eropa: "Quo Vadis" Uni Eropa?

Leonard Hutabarat

Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia, leonard.hutabarat@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

Recommended Citation

Hutabarat, Leonard (2005) "Kegagalan Referendum Konstitusi Eropa: "Quo Vadis" Uni Eropa?," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 8 : No. 1 , Article 6.

DOI: 10.7454/global.v8i1.246

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol8/iss1/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Kegagalan Referendum Konstitusi Eropa: "Quo Vadis" Uni Eropa?

LEONARD HUTABARAT

Abstract

A geopolitical revolution of historic force is under way across the Atlantic: the unification of Europe. This new "United States of Europe" has more people, more trade, more wealth, and more votes on every international body. Europe's new constitution even establishes an official European Union motto: "United in Diversity". This article will discuss why European vote "no" to the European Constitutional Treaty in last May in France as one of the founding fathers of the union. What would be the consequences of French's rejection of the Treaty. Would a "no" vote signal the end of the European integration project? Would a vote against the Constitution be a vote against free-market economics? The article also explains what will be the next possible scenarios and outcomes for "the European dream". Where the European Union go from here?

*"We are not making a coalition of States, but are uniting people".¹
(Jean Monnet, 30 April 1952)*

PENDAHULUAN

Uni Eropa (UE) adalah entitas regional yang terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Populasinya yang hampir berjumlah 455 juta jiwa tersebar di wilayah yang mencapai setengah wilayah daratan Amerika Serikat. Dalam dua tahun ini, rakyat Eropa juga sedang mengalami proses ratifikasi suatu konstitusi, yang akan menyatukan tujuan pribadi dan kolektif mereka menuju sebuah integrasi politik di kawasan Eropa.

Pada tahun 1948 dalam *Congress of Europe*, Winston Churchill mengingatkan akan masa depan benua Eropa yang hancur akibat perang dan menyampaikan visinya akan *European Dream*. Churchill menyatakan :

"We hope to see a Europe where men of every country will think of being a European as of belonging to their native land, and ... wherever they go in this wide domain ... will truly feel, 'Here I am at home'".²

Jean Monnet, yang menciptakan ide sebuah *common European community*, memahami benar betapa sukarnya untuk memenuhi mimpi Churchill tersebut. Masalahnya, menurut Monnet, adalah *"Europe has never existed; one has genuinely to create Europe"*.³ Hal ini berarti menjadikan masyarakat di Eropa menyadari akan keeropaan mereka.

Pembukaan dari *Treaty of Rome* tahun 1957, yang membentuk *European Community*,

untuk menyetujui anggaran belanja UE. Dua kegagalan itu telah menimbulkan keraguan terhadap masa depan dan relevansi entitas regional itu. Kepercayaan publik terhadap UE goyah. Bahkan Perdana Menteri Luksemburg Jean-Claude Juncker, yang ketika itu menjabat Presiden Dewan Eropa, berkomentar pahit bahwa UE sedang dalam krisis luar biasa.

Tulisan ini akan membahas perkembangan Konstitusi Eropa, faktor-faktor penyebab kegagalan referendum Konstitusi UE di Perancis, perdebatan ideologi, jatuhnya kepercayaan publik, akar dari krisis yang dialami UE dan skenario pasca penolakan Konstitusi Eropa dalam referendum di Perancis.

KONSTITUSI EROPA

Konstitusi Eropa¹² adalah suatu perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu konstitusi bagi Uni Eropa. Perjanjian ini ditandatangani tahun 2004 oleh wakil-wakil dari negara anggota Uni Eropa. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk menggantikan perjanjian-perjanjian yang telah ada dan saling tumpang tindih dan Uni Eropa saat ini membutuhkan sebuah sistem pengambilan keputusan yang ramping dan efisien sehubungan dengan menggelembungnya dari 15 menjadi 25 negara anggota. Uni Eropa juga membutuhkan traktat yang lebih sederhana – sebuah konstitusi yang dengan jelas menetapkan tujuan dan nilai-nilai Uni Eropa serta menegaskan tanggung jawab dari setiap lembaga.

Konstitusi Eropa tersebut didasarkan pada dua perjanjian utama yang ada, yaitu *Treaty of Rome* (1957) dan *Maastricht Treaty*

(1992), yang mengalami perubahan dalam perjanjian *Amsterdam* (1997) dan *Nice* (2001). Debat mengenai masa depan Eropa diawali oleh pidato Menlu Jerman Joschka Fischer di Berlin tahun 2000 yang mengusulkan diadakannya perdebatan bagi tujuan integrasi Eropa.¹³ Hal ini ditindaklanjuti dalam pertemuan Dewan Eropa di Laeken (*Laeken Declaration*) bulan Desember 2001, dan sebuah konvensi (*European Convention*)¹⁴ dibentuk tanggal 28 Februari 2002 yang dipimpin oleh mantan Presiden Perancis Valéry Giscard d'Estaing guna menetapkan sebuah draft konstitusi. Konvensi ini mencapai konsensus mengenai rancangan traktat pembentukan konstitusi bagi Eropa (*Draft Treaty establishing a Constitution for Europe*)¹⁵ dan yang kemudian diajukan kepada Konferensi Antar Pemerintahan (*Intergovernmental Conference*) yang memulai tugasnya pada bulan Oktober 2003.¹⁶ Setelah melalui proses negosiasi yang panjang dan perdebatan seputar kerangka *qualified majority voting* (QMV)¹⁷, teks final dari draft konstitusi akhirnya disepakati pada bulan Juni 2004 dalam pertemuan Dewan Eropa di Brussels dan ditandatangani oleh para kepala negara/ kepala pemerintahan ke-25 negara anggota UE di Roma tanggal 29 Oktober 2004.

Konstitusi Eropa terdiri atas pendahuluan (*Preamble*), empat bagian (*Parts*), yaitu *Constitution's Fundamental Provisions*, *Charter of Fundamental Rights*, *Union's Policies*, dan *Final Clauses*, serta sejumlah lampiran (*annexes*), protokol (*protocols*) dan deklarasi (*declarations*). Dalam Konstitusi UE, yang mencantumkan *Charter of Fundamental Rights*, UE akan memiliki kekuasaan untuk menandatangani perjanjian internasional atas namanya sendiri, dan bersifat mengikat bagi negara-negara

menyebutkan dengan jelas tujuan organisasi tersebut yaitu: *"to lay the foundations for an ever closer union among the peoples of Europe"*.⁴ Harapan besarnya adalah *"to substitute for age-old rivalries the merging of their essential interests; to create, by establishing an economic community, the bases of broader and deeper community among peoples long divided by bloody conflicts; and to lay the foundations for institutions which will give direction to a destiny henceforward shared"*.⁵ Ini merupakan entitas politik pertama dalam sejarah yang alasan dibentuknya adalah untuk *"to build peace"*.⁶

Saat ini dua pertiga masyarakat yang tinggal di negara anggota UE menyatakan bahwa mereka merasa dirinya sebagai *"European"*. Enam dari sepuluh warga UE merasa bagian dari Eropa, sementara sepertiga pemuda antara umur 21 hingga 35 tahun menyatakan mereka memandang dirinya lebih Eropa daripada sebagai warga nasional negara asalnya.⁷ Dalam salah satu survey *World Economic Forum* terhadap para pemimpin Eropa ditemukan bahwa 92 persen dari mereka melihat identifikasi masa yang akan datang lebih kepada Eropa daripada identitas nasionalnya.⁸ Perubahan ini merupakan hal yang luar biasa bagaimana persepsi masyarakat dapat berubah dalam setengah abad.

Namun demikian, ketika referendum⁹ Konstitusi UE di Perancis bulan Mei lalu hanya mencapai dukungan 45,3% dan di Belanda di bulan Juni hanya 38,4%, banyak pihak terkejut. Bagaimana mungkin publik dua negara *"the founding fathers of the Union"*¹⁰ justru menolak konstitusi. Elite UE di Brussels menyalahkan rakyatnya yang tidak memahami isi konstitusi itu. Namun sebaliknya, rakyat menuding para elitnya

di Brussels terlalu birokratis dan kurang peka terhadap aspirasi mereka. Telah terjadi *political disconnect* antara para pemimpin uni di Brussels dan rakyatnya.

Kesan selintas, krisis UE ini hanya lantaran kesenjangan komunikasi politik antara elite dan rakyatnya. Kesan lain seolah-olah krisis itu disebabkan oleh masalah teknikal ekonomis semata, seperti subsidi pertanian Perancis dan potongan kontribusi Inggris. Namun sebenarnya jauh lebih serius dari itu. Krisis UE akhir-akhir sudah mengarah ke masalah konsep, idealisme mengenai tatanan sosial ekonomi masa depan UE. Perdebatan baik antar pemimpin negara anggota maupun elite UE di Brussels telah merambah ke isu ideologi.¹¹

Penolakan terhadap Konstitusi UE oleh Perancis merefleksikan beberapa faktor seperti ketidakpuasan publik terhadap Pemerintah Perancis, kekhawatiran rakyat Perancis bahwa konstitusi akan membawa UE ke arah sistem ekonomi *"ultra liberal Anglo-Saxon"*, kecemasan bahwa perkembangan UE akan mengurangi pengaruh Perancis akibat perluasan keanggotaan, serta kekhawatiran kemungkinan keanggotaan Turki dalam UE. Meskipun terdapat banyak kemungkinan yang mendasari penolakan publik Perancis, namun untuk pertama kalinya negara pendiri UE seperti Perancis secara langsung menentang proses integrasi Eropa yang ada selama ini.

Krisis yang dihadapi UE dinilai sebagai yang terburuk sepanjang sejarah entitas regional itu. Belum lagi menyadari betul apa yang terjadi di balik gagalnya referendum di Perancis dan Belanda, masyarakatnya juga dibuat heran oleh kegagalan KTT di Brussels, Belgia, 16-17 Juni 2005 lalu

anggotanya. Hal ini juga pada akhirnya dimungkinkan untuk memperoleh satu kursi dalam Dewan Keamanan PBB – menggantikan Inggris dan Perancis. Uni Eropa juga akan memiliki seorang presiden yang dipilih oleh *European Council* yang memiliki masa jabatan lima tahun dan bertanggung jawab terhadap penentuan agenda UE. Saat ini presidensi UE berputar setiap enam bulan sekali.

Uni Eropa juga akan mempunyai seorang menteri luar negeri yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pertahanan dan luar negeri. Konstitusi Eropa menuntut adanya kebijakan pertahanan dan luar negeri yang tunggal, dan negara-negara anggota diminta untuk *"unreservedly support the Union's foreign and security policy in a spirit of loyalty and mutual solidarity"*.¹⁸ Meskipun demikian, negara anggota masih diberikan suatu *"escape clause"*. Negara anggota masih dapat abstain dari voting atau menyatakan "tidak", yang memungkinkannya untuk mem-*block* suatu proposal kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh Dewan Eropa.¹⁹

Selain itu, UE juga menyiapkan sebuah pasukan pemukul reaksi cepat Eropa (*European rapid-reaction strike force*), namun pemerintah nasional masih mengontrol angkatan bersenjata sendiri. Valéry Giscard d'Estaing, mantan Presiden Perancis yang memimpin proses penyusunan Konstitusi UE menyatakan keyakinannya bahwa masih membutuhkan waktu 20 tahun lagi bagi UE untuk memiliki sebuah kebijakan luar negeri yang satu dan terintegrasi dan berbicara dengan satu suara dalam arena internasional.²⁰

Negara anggota juga masih memiliki wewenang dalam pemberian kewarganegaraan, walaupun warga dari negara anggota memiliki hak untuk tinggal dan bekerja di negara anggota UE lainnya. Dalam konstitusi, kebijakan keimigrasian diatur untuk mengharmonisasikan masalah-masalah keimigrasian dengan isu-isu pengungsi dan suaka, dan hal ini akan diputuskan dengan suara mayoritas. Dalam ketentuan yang lama, setiap negara anggota masih dapat melakukan veto dalam hal ini.²¹ Parlemen Eropa juga akan memiliki kekuasaan pembuatan keputusan dan anggaran/budget. Kebanyakan legislasi UE yang ditetapkan dalam *Council of Ministers* akan membutuhkan persetujuan dari Parlemen Eropa.

Konstitusi UE merupakan sejenis kompromi bagi setiap orang. Bagi negara seperti Inggris dan Perancis, yang meyakini bahwa UE seharusnya merupakan perpanjangan dan bukan pengganti bagi *nation-state*, konstitusi memberikan suatu alternatif. Konstitusi memberikan penguatan bagi hak suara negara-negara besar dalam *Council of Ministers*.²² Dalam konstitusi, *council* dapat menetapkan legislasi apabila setengah dari anggota, yang mewakili 60 persen populasi UE menyetujuinya *qualified majority voting* (QMV). Hal ini memberikan negara-negara besar – Jerman, Inggris, Perancis dan Italia – kekuatan yang potensial untuk mengarahkan agenda legislasi. Sementara itu, kekuasaan *Council of Ministers* dikurangi dengan dialihkan kepada Komisi Eropa. Bagi negara-negara yang lebih kecil, yang menginginkan sebuah uni federal, konstitusi diharapkan memperkuat *European Commission*. Komisi memiliki monopoli terhadap hak untuk mengajukan legislasi yang baru. Presiden Komisi yang

dipilih oleh Parlemen Eropa akan mempunyai kekuasaan eksekutif yang lebih besar.

Constitutional Treaty yang ditandatangani tanggal 29 Oktober 2004 ini sedang mengalami proses ratifikasi oleh seluruh negara anggota UE. Apabila ini berhasil, maka menurut rencana perjanjian dimaksud akan mulai berlaku pada tanggal 1 November 2006. Namun demikian, sehubungan dengan penolakan terhadap Konstitusi Eropa dalam referendum di Perancis (29 Mei 2005) dan Belanda (1 Juni 2005), masa depan implementasi dari konstitusi ini menjadi tidak pasti.

KEGAGALAN REFERENDUM KONSTITUSI EROPA DI PERANCIS

Hasil referendum konstitusi UE di Perancis tanggal 29 Mei lalu menunjukkan suara penolakan jauh melebihi yang pro. Penolakan 54,8% rakyat Perancis terhadap Konstitusi Eropa yang ditandatangani 29 Oktober 2004 di Roma, merupakan pukulan berat bagi masa depan UE. Presiden Chirac menyatakan bahwa penolakan warganya akan menimbulkan kesulitan bagi Perancis di dalam UE, dimana negara tersebut merupakan salah satu *the founding fathers* UE. Dukungan yang hanya mencapai 45,1% tersebut telah mengirimkan sinyal negatif ke seluruh Eropa, termasuk dapat berdampak terhadap negara-negara yang sudah bersiap untuk melaksanakan referendum sejenis. Hasil referendum di Perancis juga tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat tingginya tingkat partisipasi yang menunjukkan angka sekitar 70%. Hasil ini telah menimbulkan pertanyaan besar akan masa depan UE. Hasil referendum di Perancis sangat penting tidak

hanya bagi negara tersebut, namun juga seluruh UE. Jika konstitusi itu ditolak di Perancis, maka akan menimbulkan efek domino (*domino effect*) di sejumlah negara UE lainnya.

Penolakan di Perancis membuka suatu periode ketidakpastian politik dalam UE dimana konstitusi tersebut masih perlu diratifikasi oleh 25 negara anggotanya. Akankah konstitusi UE berakhir sampai di sini, sebab konstitusi tersebut baru bisa diberlakukan apabila diratifikasi semua anggota UE. Mengapa 'gempa bumi' politik ini terjadi di Perancis? Akankah Perancis, sebagai salah satu negara pencetus integrasi Eropa, akan menghentikan langkahnya? Perancis dan Jerman menjadi pelopor UE dengan Deklarasi Robert Schuman tahun 1950 yang melahirkan *European Coal and Steel Cooperation* (ECSC).²³ Sejak saat itu Perancis menjadi negara sentral dari tiap proyek UE yang ada, dari pasar bersama hingga Euro, termasuk upaya penyusunan draft konstitusi yang dipimpin oleh mantan Presiden Perancis, Valéry Giscard d'Estaing. Semua partai politik utama di Perancis seperti Partai UMP (*Union pour un Mouvement Populaire*), UDF (*Union pour la démocratie française*) dan Partai Sosialis mendukung Konstitusi Eropa. Jadi mengapa rakyat Perancis tetap menolak Konstitusi Eropa?

Jawaban terhadap referendum itu merupakan introspeksi bagi Perancis. Terdapat setidaknya tiga elemen di dalam penolakan rakyat Perancis terhadap integrasi politik yang lebih luas tersebut. *Pertama* adalah mengenai posisi Perancis di panggung internasional. *Kedua* berkaitan dengan kegagalan ekonomi Perancis untuk mencip-

takan lapangan kerja bagi rakyatnya. Lalu *ketiga* adalah sehubungan dengan karakteristik elit politik Perancis.²⁴

PERDEBATAN IDEOLOGI

Perbedaan pandangan dalam idealisasi model sosial yang tepat untuk uni di masa depan telah membawanya pada panggung perdebatan klasik yang menyangkut ideologi. Antusiasme akan debat idealisme ini seolah memutar-balik jarum jam sejarah, mengungkit lagi perdebatan klasik soal konsep sosial ekonomi yang dilatar-belakangi ideologi.

Presiden Perancis, Chirac, pernah menyatakan liberalisme sama bahayanya dengan komunisme dan kedua ideologi itu akhirnya akan membentur tembok. Sikap ini menunjukkan Perancis akan tetap menjalankan politik ekonomi sosialis yang menekankan peran negara yang intervensionis. Dengan idealisme ini, Perancis lebih menginginkan sebuah UE yang lebih kohesif, dengan jumlah anggota lebih terbatas. Sementara itu PM Inggris, Blair cenderung mengusung paham ekonomi *Anglo-Saxon* yang liberal. Dengan faham ini, UE yang dibayangkan oleh Blair adalah kerja sama regional yang lebih luas, dengan anggota lebih besar tapi dengan ikatan politik yang longgar. Idealisasi Blair terhadap format politik uni ini sejalan dengan paham ekonomi neo-liberal yang membutuhkan pasar seluas mungkin.

Lima puluh tahun lalu, setelah terpuruk akibat Perang Dunia II, pemimpin Eropa mendambakan perdamaian dan stabilitas. Kini, proyek perdamaian dan stabilisasi itu selesai dengan terbentuknya UE. Dari konteks ancaman perang tradisional, UE

adalah kawasan aman damai. Tetapi dunia berubah, begitupun tuntutan, yang tidak selalu terkait dengan ideologi. Dulu yang didambakan oleh Eropa adalah perdamaian, keamanan negara dari ancaman perang. Sekarang yang dibutuhkan bukan lagi hanya keamanan negara, tapi juga keamanan perorangan.

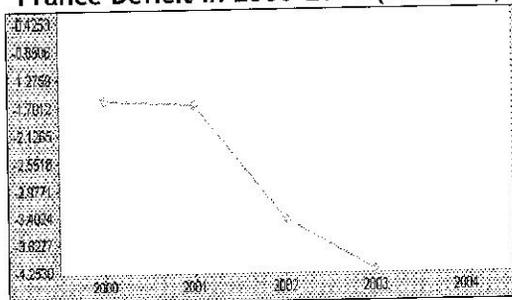
Keamanan perorangan merupakan kebutuhan langsung bagi publik UE. Selama ini isu terorisme hanya menjadi *concern* Amerika Serikat setelah peristiwa 11 September 2001. Namun kini terorisme sudah ada di 'halaman belakang' UE setelah pemboman jaringan transportasi di Madrid dan London. Seharusnya para pemimpin UE menyadari bila sejak awal para teroris tersebut tidak mengetahui apakah Spanyol atau Inggris itu berpaham *Anglo-Saxon* atau sosialis sebelum mereka meledakkan bom. Dalam konteks ini, maka yang dituntut publik Eropa sesungguhnya adalah agar mereka aman. Mereka ingin para pemimpinnya memerangi teroris, bukan berdebat soal neo-liberalisme atau sosialisme.²⁵

Dalam banyak kampanye politiknya Presiden Chirac seringkali mendengarkan perlunya suatu Eropa yang kuat *vis-à-vis* kekuatan *super power* AS, termasuk kebangkitan Cina. Apa yang disebut *Europe puissance* dengan kapabilitas pertahanannya merupakan inspirasi Perancis yang tidak bercirikan "*Anglo-Saxon, atlanticist*". Para penentang ratifikasi menyatakan konstitusi baru UE hanya akan makin memperkuat kekuasaan negara *Anglo-Saxon* secara ekonomi. Perluasan keanggotaan UE menjadi 25 negara menimbulkan kesan berkurangnya pengaruh (*traditional leadership*) dan suara Perancis di

UE dan dunia internasional, ancaman terhadap bahasa Perancis, tantangan terhadap visi yang ada serta resiko kehilangan pekerjaan.

Kondisi ekonomi Perancis yang tidak menggembirakan dengan mengalami defisit selama empat tahun terakhir dan termasuk telah melewati batas 3% dari GDP sesuai ketentuan Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan (*Stability and Growth Pact*) di Uni Eropa juga menimbulkan keraguan bagi publik Perancis. Perancis mengalami defisit sebesar 1,5% tahun 2000 dan 1,7% tahun 2001. Angka ini meningkat dua kali lipat tahun 2002 menjadi 3,4% dan naik menjadi 4,3% tahun 2003. Hal yang sama juga terjadi untuk tahun 2004, yaitu defisit masih tetap di atas 3%. Kondisi defisit tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1
France Deficit in 2000-2004 (% of GDP)



Source : World Development Indicators, World Bank, 2005

Hal-hal tersebut telah menjadikan ancaman bagi identitas Perancis. Masalahnya adalah rakyat Perancis tidak melihat UE sebagai suatu entitas yang dapat membawa kemajuan di bidang ekonomi dan keamanan di dalam dunia yang penuh konflik ini, dan juga tidak melihat Eropa baru yang disimbolkan dengan suatu konstitusi, seba-

gai penjamin dari pernyataan Chirac akan *Europe puissance*.

JATUHNYA KEPERCAYAAN PUBLIK

Jika debat ideologi sudah tidak relevan lagi, bagaimana menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap masa depan UE? Mungkin langkah pragmatis dan prioritas yang membumi perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan bagi Konstitusi Eropa. Selain memerangi terorisme, penanganan imigrasi dan pengangguran akan menjawab kebutuhan mendesak warga UE. Meluasnya keanggotaan UE hingga mencakup negara-negara di Eropa Timur yang memiliki latar belakang etnik dan agama berbeda dapat saja memicu ketegangan baru.

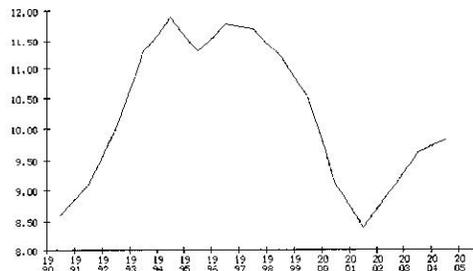
Masalah pengangguran menjadi salah satu pemicu rakyat Perancis menolak Konstitusi Eropa. Masyarakat UE resah terhadap arus migrasi dari negara anggota baru (bekas negara komunis Eropa Timur) dan dari negara-negara lain (kawasan Afrika Utara) yang umumnya lebih ulet dan tidak memilih-milih jenis pekerjaan. Keresahan inilah kiranya yang perlu dijawab oleh para pemimpin UE agar para konstituennya menjadi faham bahwa Konstitusi Eropa, yang di Bagian III-nya²⁶ banyak mengatur kebijakan liberalisasi ekonomi, memang benar-benar bermanfaat bagi mereka.

Benar saja bahwa hasil debat ideologi akan menjadi panduan strategis bagi pembentukan UE dengan identitas yang jelas di masa depan. Tapi yang lebih dibutuhkan oleh publik Eropa saat ini adalah langkah-langkah pragmatis yang menjawab kebutuhan jangka pendek mereka: aman dari ancaman teror dan mendapat pekerjaan.

Apabila para pemimpin uni mampu menjawab ini, kepercayaan publik dapat pulih sehingga mereka akan memberikan dukungan saat referendum Konstitusi UE tahun depan.

Kekhawatiran akan ekonomi Perancis dan adanya delokalisasi serta hilangnya lapangan kerja dengan masuknya negara-negara eks Eropa Timur sangat mempengaruhi pilihan publik Perancis dalam referendum lalu. Demikian pula halnya dengan liberalisasi jasa dan kekhawatiran para pekerja murah akan membanjiri Perancis serta memotong penghasilan warga Perancis. Hal inilah yang menyebabkan banyak generasi muda merasa sangat pesimis dan khawatir. Isu pengangguran di Perancis yang telah mencapai di atas 10% pada awal tahun 2005 juga telah menjadi kekhawatiran utama dalam 20 tahun terakhir ini dan telah dapat memobilisasi dukungan bagi pihak yang kontra terhadap konstitusi. Tingkat pengangguran selama periode 1990-2004 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2
Unemployment Rate in France (%) Year

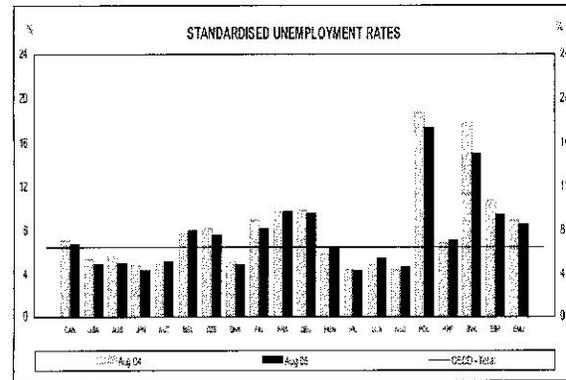


Sumber : www.economagic.com

Sebagai perbandingan, grafik di bawah menggambarkan perkembangan terakhir Perancis sebagai salah satu negara anggota OECD (*Organization for Economic Co-*

operation and Development) dalam hal tingkat pengangguran yang telah melewati batas rata-rata negara OECD tahun 2005.

Grafik 3
Unemployment Rate in OECD Countries



Source : OECD Main Economic Indicators, OECD, October 2005

Hasil referendum menunjukkan protes publik terhadap para elite politik yang dipandang tidak jujur terhadap konstituentnya. Hasil referendum juga merupakan protes dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Chirac saat ini. Rakyat Perancis merasa di *fait accompli* dengan janji-janji yang dianggap tidak jujur. Para politisi dan ekonom menyatakan Euro akan menurunkan harga di Perancis, namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Kebijakan ekonomi yang diterapkan UE dipandang lebih mementingkan kepentingan bisnis daripada permasalahan sosial yang ada selama ini.

AKAR DARI KRISIS UNI EROPA

Dari karakter debat publik yang ada terlihat bahwa banyak dari rakyat Eropa merasa teralienasi antara dirinya dan organisasi UE tersebut. Bahkan ketidakpuasan publik terhadap para pemimpin

nasionalnya lebih besar daripada institusi UE itu sendiri. Referendum menjadi salah satu kesempatan bagi para pemilih untuk memberikan penilaian atau menyatakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah yang tidak populer dalam banyak isu yang mungkin tidak berkaitan dengan *treaty* atau bahkan UE secara umum. Dalam konteks ini, UE telah menjadi sandera dari efek samping yang pada dasarnya diakibatkan oleh suatu drama politik nasional.

Pelajaran dari perkembangan ini adalah bagi para pemimpin politik negara anggota UE. Masalahnya tidaklah sesederhana seperti tidaklah mungkin memperlakukan UE dan membicarakannya seperti pertunjukan bagi kepentingan nasional selama enam hari dalam seminggu, lalu pada hari Minggu meminta publik untuk memberikan suaranya dengan keyakinan dan antusiasme. Namun di sisi lain, perasaan teralienasi antara sektor opini publik yang penting dengan UE itu sendiri telah memiliki akar yang dalam. Terdapat juga penolakan dalam hal sistem pengambilan keputusan yang dianggap terlalu teknokratik dan elitis. Hal ini disebabkan oleh perasaan publik yang diberikan sedikit kesempatan untuk memahami (hanya diminta menilai), apa yang sedang terjadi atas nama mereka dan oleh institusi UE.

Terlalu banyak politisi untuk waktu yang lama menggunakan "Brussels" sebagai suatu eufemisme bagi sesuatu yang harus dikonfrontasikan, ditentang, diabaikan, atau dilewati, sebagai suatu ancaman bagi kepentingan nasional. UE seringkali digunakan sebagai kambing hitam (*scapegoat*) bagi para politisi nasional ketika kebijakan yang mereka putuskan adalah penting namun mungkin tidak populer di dalam

negeri, yang kemudian kesalahannya ditujukan kepada Brussels. Adalah sah bagi para pemimpin politik untuk "membela kepentingan nasionalnya di Brussels." Namun sama pentingnya bagi mereka untuk "membela Eropa di dalam negerinya sendiri." Hal inilah yang tidak konsisten terjadi atau dilakukan oleh banyak para pemimpin politik di negara anggota UE, sehingga konsekuensi dari hal tersebut jelas terlihat oleh banyak orang.

Publik Eropa tidak hanya protes terhadap minimnya informasi atau komunikasi dari UE dan institusinya. Banyak yang dapat dan seharusnya dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan publik dan pemahaman mereka bagaimana UE tersebut berfungsi dan mengenai pilihan-pilihan kebijakan yang utama. Negara anggota memiliki dan mengambil bagian dalam "ownership" dari pesan-pesan yang disampaikan ke tengah-tengah masyarakat tengah Eropa dengan kemitraan penuh dengan institusi-institusi UE.

Namun dalam demokrasi Eropa modern, publik juga tidak hanya berharap untuk dikonsultasikan namun juga ikut serta membentuk dan terlibat dalam arah masa depan UE dengan menentukan pilihan antara program, partai politik dan para pemimpin yang potensial duduk di lembaga eksekutif. Hal itulah yang menjadi kebiasaan dari para pemilih dalam kehidupan politik secara lokal, regional dan nasional. Pada saat ini tidak ada kesempatan yang nyata bagi masyarakat untuk menjalankan pilihan-pilihan tersebut pada level Eropa – baik mengenai pilihan kebijakan strategis yang dihadapi UE atau siapa yang harus menyiapkan kepemimpinan politik dan institusinya. Adalah tidak

lagi kredibel untuk mengklaim bahwa mandat demokrasi secara tidak langsung dari *President of the Council* dan khususnya *commission* yang diterima dari negara anggota sudah cukup bagi suatu uni politik dengan skala tanggung jawab yang diemban UE saat ini.

SKENARIO PASCA PENOLAKAN KONSTITUSI EROPA

Setelah melalui serangkaian debat yang panjang akhirnya rakyat Perancis menyatakan penolakannya terhadap Konstitusi Eropa. Negara *the founding fathers* lainnya dari *European Community* – Belanda – melakukan hal yang sama. *Treaty* tersebut mungkin tidak otomatis mati atau gagal, namun hasilnya benar-benar di luar dugaan birokrat Brussels. Hasil tersebut juga merupakan tantangan bagi KTT UE di Brussels beberapa saat kemudian untuk membicarakan krisis yang paling serius yang dihadapi organisasi regional tersebut serta tantangan yang akan dihadapi dalam proses integrasi Eropa lebih lanjut pada tahun-tahun yang akan datang.

Dewan Eropa (*European Council*) harus memutuskan apakah harus mengenyampingkan sementara waktu *treaty* tersebut dari pembahasan mengingat perkembangan yang terjadi di Perancis dan Belanda. Apabila ini dilakukan maka proses ratifikasi akan terhenti. Keputusan seperti itu juga akan dipandang oleh negara anggota lainnya tidak adil. Dimana sejauh ini 9 negara telah memberikan keputusannya – baik melalui referendum atau proses parlementer – untuk meratifikasi *the Constitutional Treaty* tersebut. Setelah Belanda, 14 negara anggota lainnya belum memutuskan, dan negara-negara seperti Denmark,

Polandia, Irlandia, Inggris dan negara lainnya – juga harus didengar pendapatnya seperti halnya rakyat Perancis dan Belanda.

Hanya setelah proses ratifikasi di seluruh 25 negara anggota UE maka dapat diputuskan penilaian akhir tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap Konstitusi Eropa dimaksud. Memang benar bahwa implementasi bagi konstitusi tersebut membutuhkan ratifikasi dari seluruh anggota tanpa terkecuali. Namun terdapat klausul yang menyatakan bahwa *European Council* dapat mempertimbangkan langkah yang terbaik untuk dilakukan apabila hanya empat perlima dari hegara anggota yang meratifikasinya. Apa yang disebut sebagai “*moment of truth*” hanya mungkin diketahui setelah Inggris melaksanakan referendum in pada pertengahan tahun 2006 yang akan datang. Pada saat itu keputusan akhir akan ditentukan apakah akan melanjutkan atau menghentikan *Treaty* tersebut. Sementara itu, debat tetap akan berlanjut, pilihan terhadap UE akan diklarifikasi kembali – atau apabila diperlukan adanya pemikiran suatu “*Plan B*” dan kesiapan terhadap keputusan yang akan diambil. Seperti dinyatakan oleh mantan PM Inggris Harold Wilson bahwa “*A week in politics is a long time.*”

Penolakan Perancis terhadap *treaty* juga terjadi 50 tahun yang lalu setelah *The Messina Conference*, yang membuka jalan bagi *Treaty of Rome* dan menghasilkan *European Community*. Namun meskipun *Messina conference* dilihat sebagai upaya yang dramatis bagi terwujudnya integrasi Eropa, peristiwa itu juga merupakan produk dari krisis yang sama dari *European Project* setahun sebelumnya, dimana Perancis menolak rancangan yang dikenal

dengan *European Defence Community*. Kadangkala krisis yang terjadi menyebabkan kemajuan-kemajuan yang tidak terduga kemudian.

Apakah terdapat "*Plan B*" untuk menyelamatkan Konstitusi UE? Setelah dua tahun pasca penandatanganan traktat bagi Konstitusi Eropa (29 Oktober 2004), dan empat perlima negara anggota telah meratifikasinya dan satu atau lebih negara anggota mengalami kesulitan dalam pelaksanaan ratifikasi, maka masalah tersebut akan diajukan kepada *European Council* (Article IV-443-4).²⁷ Demikian pernyataan yang dihasilkan oleh para pemimpin UE sebelumnya dalam *Intergovernmental Conference* tahun 2004. Dengan demikian maka penolakan oleh satu negara anggota UE tidak secara otomatis mengakhiri Konstitusi. Setidaknya proses ratifikasi harus dilakukan di ke-25 anggota UE sebelum diputuskan langkah apa yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Dampak penolakan terhadap Konstitusi Eropa di Perancis memunculkan tiga skenario. *Pertama*, tetap melanjutkan proses ratifikasi dan meminta negara yang menolak untuk melakukan voting kembali (*second referendum*) dengan mempertimbangkan alasan-alasan penolakan yang ada. Hal ini pernah dilakukan oleh Denmark dan Irlandia terhadap *Maastricht Treaty* (1992) dan *Nice Treaty* (2001). *Kedua*, negara anggota dapat menyetujui ke-24 negara anggota lainnya dapat melanjutkan dan mengadopsi konstitusi tersebut. *Ketiga*, menghentikan proses ratifikasi dan mempertimbangkan langkah selanjutnya, apakah menghentikan sama sekali atau mendraft ulang konstitusi. Para pemimpin UE akan berupaya menarik beberapa bagian

dari konstitusi dengan revisi sesuai kesepakatan di antara para kepala negara / kepala pemerintahan, meskipun langkah ini berarti negara anggota tidak memperoleh legitimasi sepenuhnya dari masyarakat. Upaya untuk mendapatkan versi yang baru dari konstitusi dengan mengandung perubahan utama dalam hal proses pengambilan keputusan UE dan pasal-pasal penting lainnya mungkin diharapkan akan menghasilkan teks konstitusi yang tidak terlalu kontroversial untuk diratifikasi. Usulan Perancis kemungkinan besar sukar untuk diterima negara lain, seperti halnya Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso menyatakan tanggal 18 Mei lalu bahwa tidak ada *Plan B* apabila Perancis menolak konstitusi, dan tidak ada kemungkinan untuk menegosiasikan kembali konstitusi tersebut. Ataukah kegagalan dalam meratifikasi konstitusi ini akan mengarah kepada stimulasi bagi perwujudan negara-negara "*core group*", termasuk Perancis, yang akan melanjutkan integrasi lebih cepat daripada yang lain.

Franco-German core dapat menjadi sebuah *institutional club* yang baru yang bersifat komplementer terhadap UE yang lebih luas, dan memungkinkan beberapa negara lainnya berintegrasi lebih jauh dalam kebijakan daripada yang terkandung pada *constitutional treaty*. Kebijakan tersebut dapat meliputi pengaturan ekonomi *eurozone*, kebijakan luar negeri, pajak korporasi, kebijakan imigrasi dan UU kriminalitas. Negara-negara yang tergabung dalam *core group* akan memimpin UE, sementara negara-negara lain yang berada pada posisi *periphery* akan dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti atau menentang *group* tersebut.

PENOLAKAN MELALUI REFERENDUM: AKHIR DARI KONSTITUSI EROPA?

Terdapat dua hal ekstrem yang perlu dihindari setelah hasil referendum Perancis yang menyatakan “no” bagi Konstitusi Eropa. *Pertama*, memahami penolakan *Treaty* sebagai awal dari akhir UE secara keseluruhan terutama terhadap euro – mata uang tunggal Eropa. Para pendukung – seperti kelompok *populist, nationalist, anti-European right* – akan melihat hasil referendum sebagai suatu pertanda dari retaknya UE. Selain itu munculnya sikap yang menolak euro juga dipandang dapat timbul akibat negara anggota berpaling pada arah yang proteksionis sebagai upaya untuk merespons ketidakpuasan publik terhadap tingginya tingkat pengangguran dan stagnasi ekonomi.

Kekhawatiran terhadap UE yang seperti tersebut di atas tidak akan terjadi. Proses integrasi Eropa – yang telah menyentuh banyak bidang pribadi dan kolektif warga Eropa – telah mencapai suatu titik dimana perjalanan sejarah Eropa pasca Perang Dunia II tidak dapat dihentikan lagi. Meskipun mungkin masih terdapat para politisi yang menginginkan memutar kembali jarum jam ke belakang, namun pendapat yang meyakini akan terjadinya kekacauan ekonomi dan politik tidak akan terjadi. Termasuk juga kemungkinan munculnya disintegrasi yang serius. Bahkan akan lebih sulit untuk menegosiasikan apa yang disebut dengan disintegrasi dalam UE saat ini daripada menyepakati suatu proses integrasi yang lebih lanjut lagi.

Dalam kenyataannya, proses integrasi Eropa bukan didasarkan pada agenda politik “*federalist*” semata. Apabila itu

masalahnya, proses yang muncul mungkin akan terjadi sebaliknya. Kekuatan yang mendukung politik Eropa jelas menunjukkan, setidaknya untuk sementara ini, hilangnya visi strategis, yang mampu memobilisasi dukungan publik dalam skala massal. Ketika negara anggota UE menyepakati untuk bekerjasama lebih dekat satu sama lain atau mengambil keputusan bersama berdasarkan “*shared sovereignty*”, mereka melakukan hal tersebut karena menyadari adanya tantangan-tantangan yang terlalu besar bagi tiap pemerintah untuk meresponsnya secara sendiri-sendiri. Globalisasi, munculnya Amerika Serikat sebagai satu-satunya “*hyper-power*” dunia, dan ancaman sistemik dari pemanasan global (*global warming*) serta terorisme internasional, ini semua adalah tantangan-tantangan yang menyebabkan pemerintahan yang ada di dunia untuk memutuskan dan bertindak secara bersama-sama. Uni Eropa adalah salah satu contoh yang paling maju dari globalisasi di kawasan, “*a community based on sovereignty sharing, democracy and the rule of law*”, yang berkembang secara internasional. Kemungkinan bahwa “*treaty*” mengenai Konstitusi Eropa harus dipetieskan untuk sementara waktu akan menimbulkan “*shock*” bagi negara anggota dan institusi UE. Hal itu tidak akan menyebabkan debat dalam reformasi ekonomi dan modernisasi (*the “Lisbon Process”*)²⁸ atau bagi masa depan manajemen pemerintah yang menjalankan *euro* menjadi lebih mudah.

Tantangan lainnya adalah meremehkan situasi yang terjadi akibat hasil referendum Perancis. Apabila *Constitutional Treaty* saat ini dalam kondisi yang dapat digambarkan seperti suatu institusi yang “terluka”, akan terdapat dampak yang serius bagi berfungsi

sinya UE dan kontraknya dengan rakyat Eropa. Tidak dapat dilupakan bahwa hampir satu dekade yang lalu, para pemimpin UE memutuskan bahwa prospek perluasan institusi yang besar dan berlanjut terus akan menyebabkan 'root and branch reform' dari UE dalam hal institusi dan proses pembuatan keputusan. *The Treaty of Amsterdam* dan khususnya *the Treaty of Nice* gagal menentukan apa yang diperlukan. Itulah mengapa *Convention on the Future of Europe* dilaksanakan dan dibicarakan selama dua tahun dan mengapa proposalnya didebatkan satu tahun kemudian dalam *Inter-Governmental Conference (IGC)* yang dihari oleh 25 negara anggota.

Apabila *treaty* mengenai Konstitusi Eropa harus dipertimbangkan untuk dibekukan sementara waktu, mungkin akan membutuhkan proses yang lebih lama dari yang diduga. Adalah sangat sulit untuk membayangkan suatu skenario dimana *treaty* dapat dinegosiasikan kembali dari atas hingga ke lapis bawah dalam jangka waktu pendek. Sesungguhnya UE memerlukan pemilihan kepemimpinan nasional yang baru di beberapa negara anggota UE, dalam 2-3 tahun yang akan datang.

Iklim politik yang tercipta dalam UE dalam mengambil sejumlah keputusan penting pada periode berikutnya akan sangat menentukan. Dapatkah dibayangkan kegagalan dalam meratifikasi *treaty* konstitusi Eropa akan membantu atmosfer dimana 25 anggota akan memutuskan anggaran dan kerangka finansial bagi upaya perluasan keanggotaan UE hingga tahun 2013? Apakah iklim yang baru dimana negara anggota akan lebih siap mengambil keputusan yang sulit yang dibutuhkan bagi ekonomi Eropa atau menciptakan keseim-

bangun baru antara daya saing dan solidaritas sosial?

Penundaan *treaty* juga berarti bahwa UE tidak dapat melangkah ke depan untuk menunjuk seorang Menlu UE atau rancangan *European Diplomatic Service*. Hal ini juga akan menghambat upaya-upaya UE bagi terciptanya *European Common Foreign Security and Defence Policy (CFSP)*. Bagi pihak yang melihat UE untuk memimpin dunia menuju suatu *global system* yang didasarkan pada *rule of law, democracy* dan *human rights*, hasil referendum yang negatif akan terlihat sebagai suatu keengganan oleh orang Eropa untuk memainkan peran yang serius dalam panggung internasional.

Iklim politik yang lebih dingin akan menyulitkan pembahasan mengenai perluasan UE yang akan datang. Akses Bulgaria dan Rumania tahun 2007 tampaknya telah disepakati. Namun debat tentang aplikasi keanggotaan Turki masih timbul di Perancis dan Belanda. Keputusan akhir akses Turki, negara-negara Balkan dan kemungkinan Ukraina tampaknya masih akan membutuhkan 10 hingga 15 tahun lagi. Namun, apabila UE kembali pada proses unifikasi karena tidak dapat menyepakati perluasan keanggotaan secara koheren, demokratis, maka kemajuan untuk mewujudkan Eropa menuju demokrasi, perdamaian dan kemakmuran tidak akan dapat tercapai.

Fokus perhatian dalam jangka pendek adalah bagaimana mempertahankan momentum dari CFSP. Terdapat dukungan bagi penunjukan *President of the Council* dan meninggalkan sistem presidensi yang berganti setiap 6 bulan sekali. Namun bagi pihak lain, hal ini hanya dapat diterima

apabila ada perubahan seperti mempertahankan "a proper balance" antara *Council*, *Commission* dan *European Parliament* dan juga antar negara besar dan negara kecil. Terdapat tekanan yang muncul dari ketidakmungkinan ke-25 anggota untuk berfungsi secara efektif berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Nice Treaty*. Ini akan semakin terlihat jelas apabila negara-negara anggota UE gagal mencapai kesepakatan dalam hal pembiayaan anggaran UE atau masih belum berjalannya *Lisbon Process* serta ketidakmampuan UE untuk membuktikan dirinya mampu berbicara dan bertindak secara satu dalam panggung internasional. Dampak jangka menengah dari penolakan konstitusi tersebut akan menimbulkan fase baru – "*Euro-sclerosis*." Harga yang harus dibayar dari stagnasi yang terjadi tidak dapat dikalkulasikan dengan mudah saat ini. Semakin lama hal ini terjadi, semakin besar dan semakin tidak dapat diperkirakan dampak negatifnya – bagi Eropa dan dunia.

PENUTUP

Dengan dan tanpa *Constitutional Treaty*, defisit demokrasi yang dialami UE hanya dapat dijabatani dengan aliansi yang aktif dari *European Parliament* (dan khususnya dengan berkembangnya partai politik Eropa) bersama organisasi *civil society* lainnya. Partai politik Eropa harus cepat melakukan transisi menuju "*trans-national political parties*". Ini artinya mereka tidak hanya menawarkan program alternatif bagi para pemilihnya, namun juga siap menjadi calon Presiden Komisi Eropa. Apabila ini terjadi maka pemerintah negara anggota UE akan terikat pada "*electorates*"-nya tersebut. Hasil referendum di Perancis menunjukkan bahwa para politisi dan

teknokrat dalam era *direct democracy* tidak lagi dapat mendesain ulang Eropa menurut pandangannya sendiri apa yang terbaik bagi publik. Para pemimpin politik negara anggota UE akan dituntut pertanggungjawabannya dalam setiap isu mengenai UE oleh rakyatnya.

Hanya dengan cara ini, perasaan memiliki (*a sense of ownership*) dari proyek-proyek Eropa mendapat tempat di hati publik Eropa. Sejak terjadinya dua perang dunia, setidaknya hanya ikatan implisit dan pasif yang menyatukan para pembuat keputusan dengan masyarakat terhadap perwujudan konstruksi yang dikenal dengan nama UE tersebut. Saat ini adalah penting untuk memperkuat kembali ikatan yang ada bagi generasi yang baru dan dunia yang baru yang melihat prestasi terciptanya perdamaian di Eropa, stabilitas, kerjasama dan persatuan di kawasan Eropa bukan sebagai hal-hal yang "*taken for granted*".

Penolakan Perancis terhadap Konstitusi Eropa disebabkan oleh proses perluasan keanggotaan UE yang dipandang menyulitkan Perancis menjalankan kepemimpinan tradisionalnya. Perancis juga dilanda kekhawatiran terhadap masa depan politik dan ekonomi. Suara "No" Perancis juga dapat menyebabkan dilaksanakannya referendum kedua. Hal yang sama juga pernah terjadi pada Denmark dan Irlandia yang berhasil memenangkan referendum kedua terhadap *Treaty Maastricht* (1992) dan *Nice* (2001).

Konsekuensi politik penolakan Perancis terhadap Konstitusi Eropa semakin menunjukkan kompetisi dua visi yang berbeda terhadap UE. Pada satu pihak negara-negara seperti Inggris, Polandia Republik

Ceko, negara-negara Nordik dan Baltik, lebih mendukung adanya ekonomi yang lebih liberal. Sementara pihak yang lain yang termasuk dalam "*integrationist group*" yang didukung Perancis, Jerman, Belgia dan Italia, lebih mendukung proteksi sosial yang lebih tinggi. Dalam jangka pendek, penolakan tersebut juga dapat menimbulkan kemunduran terhadap reformasi ekonomi, dimana hal tersebut dapat diinterpretasikan penolakan terhadap upaya-upaya liberalisasi UE. Penolakan ini juga dapat memiliki implikasi terhadap proses perluasan keanggotaan lebih lanjut.

Apakah dengan ditolaknya konstitusi UE di Perancis, maka semuanya telah berakhir? Uni Eropa masih dapat berjalan terus tanpa konstitusi dengan aturan-aturan yang telah ada selama ini. Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa "tsunami politik" di Perancis dapat menyebabkan krisis dan stagnasi di tubuh UE serta melemahnya legitimasi UE, termasuk penundaan terhadap rencana perluasan keanggotaan UE selanjutnya. Akankah terjadi *snowball effect* akibat hasil referendum Perancis? Masih terlalu dini untuk dipastikan mengingat dinamika yang masih berkembang apabila berbicara mengenai Eropa bersatu. Apabila Presiden Chirac menyatakan "*One cannot be European and vote no. The EU Treaty is the daughter of 1789*", maka hasil referendum di Perancis merupakan *quo vadis* bagi masa depan Eropa selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Artikel

Bomberg, Elizabeth and Alexander Stubb. 2003. *The European Union : How does it Work?* New York : Oxford University Press.

Cameron, Fraser. 2004. *The Future of Europe: Integration and Enlargement*. London and New York : Routledge.

Diez, Thomas and Wiener, Antje. 2004. *European Integration Theory*. New York : Oxford University Press.

Dinan, Desmond. 1999. *Ever Closer Union : An introduction to European Integration*, 2nd ed. Boulder, CO : Lynne Rienner.

Rodriguez-Pose, Andrés. 2002. *The European Union : Economy, Society, and Polity*. New York : Oxford University Press.

Shore, Chris. 2000. *Building Europe : The Cultural Politics of European Integration*. London : Routledge.

Weiler, J.H.H. and Marlene Wind. 2003. *European Constitutionalism Beyond the State*. Cambridge : Cambridge University Press.

Surat Kabar, Majalah dan Jurnal

Byatt, A. S. "What Is a European", *The New York Times Magazine*, 31 Oktober 2002.

Djumala, Darmansjah. "UE, Debat Klasik, Kepercayaan Publik", *Sinar Harapan*, 16 Juli 2005.

Emmerson, Tony. "The Power of Europe", *Newsweek*, 16-23 September 2002.

Hutabarat, Leonard. "Quo Vadis Uni Eropa", *Kompas*, 11 Juni 2005.

Parker, George and Daniel Dombey. "Not Perfect But More Than We Could Have Hoped For: Europe's Draft Constitution", *Financial Times*, 20 June 2003.

Sciolino, Elaine. "Visions of a Union : Europe Gropes for an Identity", *The New York Times*, 15 December 2002.

"Special Report: Europe's Constitution," *The Economist*, 21 June 2003.

Healthcoat-Amory, David.. "The Constitution Is a Sham", *The Wall Street Journal Europe*, 20-22 June 2003.

Mitchener, Brandon. "EU Backs Initiative on Draft Constitution", *The Wall Street Journal Europe*, 23 June 2003.

Dokumen

Commission of the European Communities (CEC). 1983. *Treaties Establishing the European Communities*. Luxembourg: Official Publications of the European Communities (OOPEC).

Commission of the European Communities (CEC). 2005. *Treaties Establishing a Constitution for Europe*. Luxembourg: Official Publications of the European Communities (OOPEC).

European Commission. "How European See Themselves", September 2000.

Situs Internet

<http://www.delidn.cec.eu.int>

<http://www.europa.eu.int>

<http://www.worldbank.org>

<http://www.oecd.org>

CATATAN BELAKANG

¹ European Communities, *A Constitution for Europe, Rome, 29.10.2004*, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2004, hlm. 6.

² A. S. Byatt, "What Is a European", *The New York Times Magazine*, 31 October 2002.

³ Elaine Sciolino, "Visions of a Union: Europe Gropes for an Identity", *The New York Times*, 15 Des 2002.

⁴ *Treaty of Rome*, 25 March 1957. www.europa.eu.int.

⁵ Commission of the European Communities (CEC), *Treaties Establishing the European Communities*, Official Publications of the European Communities (OOPEC), Luxembourg, 1983.

⁶ Chris Shore, *Building Europe : The Cultural Politics of European Integration*, Routledge, London, 2000, hlm. 15.

⁷ The European Commission, "How European See Themselves", September 2000.

⁸ Tony Emmerson, "The Power of Europe", *Newsweek*, 16-23 September 2002.

⁹ Negara anggota UE dapat meratifikasi *constitutional treaty* melalui *parliamentary vote*, atau melakukan referendum. Bagi beberapa negara anggota UE, referendum adalah bersifat *mandatory*. Sepuluh negara anggota UE menyatakan akan melaksanakan referendum terhadap *constitutional treaty* tersebut, sementara 15 negara anggota lainnya akan meratifikasi perjanjian tersebut di parlemennya. Berlakunya perjanjian ini membutuhkan ratifikasi dari seluruh negara anggota tanpa kecuali.

¹⁰ Uni Eropa diawali pada tahun 1950-an sebagai "European Communities" yang beranggotakan enam negara (*the founding fathers*), yaitu Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luksemburg, dan Belanda. Keenam negara tersebut tanggal 25 Maret 1957 di Roma menandatangani *Treaty Establishing the European Economic Community (EEC Treaty)*.

¹¹ Darmansjah Djumala, "Uni Eropa, Debat Klasik, Kepercayaan Publik", *Sinar Harapan*, 16 Juli 2005.

¹² Konstitusi Eropa merujuk kepada *Treaty establishing a Constitution for Europe*, atau biasa disebut *European Constitution*. Meskipun disebut Konstitusi Eropa, konstitusi ini hanya mencakup Uni Eropa, dan bukan keseluruhan Eropa dalam pengertian geografis.

¹³ "Official Journal of the European Union," C169, 18 July 2003, www.europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_treaties.html.

¹⁴ Hasil Konvensi diserahkan dalam *Thessaloniki European Council* tanggal 20 Juni 2003. Informasi lebih lanjut tentang Konvensi yang dibentuk tanggal 28 Februari 2002 dan terdiri atas 105 anggota ini dapat dilihat pada <http://www.european-convention.eu.int>.

¹⁵ Draft final Konstitusi Eropa diserahkan kepada Presidensi Dewan Eropa di Roma tanggal 18 Juli 2003.

¹⁶ Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *Intergovernmental Conference* (IGC) dalam <http://ue.eu.int/cms3/fo/showPage.ASP?id=251&lang=fr>.

¹⁷ *Qualified Majority Voting* (QMV) adalah sebuah prosedur voting dalam Dewan Eropa sesuai alokasi suara bagi negara anggota berdasarkan jumlah penduduknya. Persyaratan QMV adalah proposal didukung 232 dari 321 suara (72,27%); didukung mayoritas negara anggota; dan negara yang mendukung mewakili sedikitnya 62% dari keseluruhan penduduk Uni Eropa. Apabila Konstitusi Eropa mulai diberlakukan kondisi QMV lebih disederhanakan dengan "double majority" dari 55% negara anggota yang mewakili 65% populasi Uni Eropa. *Blocking minority* dimungkinkan apabila didukung setidaknya oleh 4 negara anggota. QMV akan mulai berlaku tahun 2009.

¹⁸ David Heathcoat-Amory, "The Constitution Is a Sham", *The Wall Street Journal Europe*, 20-22 June 2003.

¹⁹ "Special Report : Europe's Constitution", *The Economist*, 21 June 2003, hlm. 22.

²⁰ Brandon Mitchener, "EU Backs Initiative on Draft Constitution", *The Wall Street Journal Europe*, 23 Juni 2003.

²¹ "Special Report : Europe's Constitution", *Op.Cit.*

²² George Parker and Daniel Dombey, "Not Perfect But More Than We Could Have Hoped For : Europe's Draft Constitution", *Financial Times*, 20 Juni 2003.

²³ Pada tanggal 9 Mei 1950 Menlu Perancis Robert Schuman menyampaikan usulan pembentukan organisasi dalam bidang produksi baja dan batubara di Eropa untuk mencegah negara-negara Eropa kembali berperang satu sama lain. Proposal ini kemudian dikenal sebagai "Schuman Declaration" dan dipandang sebagai cikal bakal pembentukan organisasi yang dikenal saat ini sebagai Uni Eropa. Tanggal 9 Mei juga menjadi "Europe Day" yang dirayakan oleh semua negara anggota UE tiap tahun.

²⁴ Leonard Hutabarat, "Quo Vadis Uni Eropa", *Kompas*, 11 Juni 2003.

²⁵ Darmansjah Djumala, "Uni Eropa, Debat Klasik, Kepercayaan Publik", *Sinar Harapan*, 16 Juli 2005.

²⁶ *Treaty Establishing a Constitution for Europe Part III – The Policies and Functioning of the Union*, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2005, hlm. 61-191.

²⁷ *Treaty Establishing a Constitution for Europe, Part IV – General and Final Provisions, Article IV-443-4 Ordinary Revision Procedure*, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2005, hlm. 197.

²⁸ *Lisbon Process* atau *Lisbon Strategy* yang ditetapkan di Lisbon oleh *European Council* bulan Maret 2000 adalah serangkaian komitmen dan strategi anggota UE dalam 10 tahun mendatang untuk melakukan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan.